BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU

LAPORAN KINERJA 2024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **1**

DAFTAR ISI **2**

DAFTAR TABEL **3**

DAFTAR GAMBAR **4**

DAFTAR BAGAN **4**

KATA PENGANTAR **5**

BAB I PENDAHULUAN **6**

A. Latar Belakang 6

B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu 6

C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu 8

D. Sumber Daya 12

E. Isu Strategis 14

BAB II PERENCANAAN KINERJA 16

A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu 16

B. Arah Kebijakan dan Strategi Organisasi 18

C. Perjanjian Kinerja 20

D. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2024 21

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 23

A. Hasil Evaluasi AKIP 24

B. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu 25

C. Analisis Efisiensi 48

D. Perubahan Budaya Kerja 48

E. Realisasi Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu 49

BAB IV PENUTUP 54

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pejabat Struktural BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu 9
Tabel 1. 2 Jumlah Posisi Pegawai 12
Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Pemeriksa 13
Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender 13
Tabel 1. 5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan 13
Tabel 1. 6 Perbandingan Anggaran Awal dan Anggaran Revisi 14
Tabel 1. 7 Persentase Realisai terhadap Anggaran TA 2024 14
Tabel 2. 1 Target Indikator Kinerja Perwakilan Provinsi Bengkulu 19
Tabel 2. 2 Target IKU BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2024 20
Tabel 2. 3 Aktivitas Rencana Aksi Tahun 2024 23
Tabel 3. 1 Hasil Evaluasi Self-Assesment AKIP Perwakilan Bengkulu Tahun 2024 24
Tabel 3. 2 Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2024 27
Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Pencapaian Kinerja Tahun 2024 dengan Realisasi dua Tahun Terakhir 27
Tabel 3. 4 Realisasi Tahun 2024 dengan target akhir Renstra 2024 28
Tabel 3. 5 Perkembangan Capaian IKU 1 29
Tabel 3. 6 Perkembangan Capaian IKU 2 31
Tabel 3. 7 Perkembangan Capaian IKU 3 32
Tabel 3. 8 Perkembangan Capaian IKU 4 34
Tabel 3. 9 Perkembangan Capaian Realisasi IKU 5 36
Tabel 3. 10 Perkembangan Capaian Realisasi IKU 6 36
Tabel 3. 11 Perkembangan Capaian Realisasi IKU 7 37
Tabel 3. 12 Perkembangan Capaian Realisasi IKU 8 39
Tabel 3. 13 Perkembangan Capaian Realisasi IKU 9 40
Tabel 3. 14 Perkembangan Capaian Realisasi IKU 10 42
Tabel 3. 15 Perkembangan Capaian Realisasi IKU 11 43
Tabel 3. 16 Perkembangan Capaian Realisasi IKU 12 45
Tabel 3. 17 Perkembangan Capaian Realisasi IKU 13 47
Tabel 3. 18 Anggaran dan Realisasi Belanja 49
Tabel 3. 19 Anggaran dan Realisasi RKP Tahun 2024 49
Tabel 3. 20 Realisasi Volume Keluaran dengan Realisasi Anggaran Tahun 2024 51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Jumlah Posisi Pegawai 12
Gambar 1. 2 Jumlah Pegawai Pemeriksa 13
Gambar 1. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender 13
Gambar 1. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan 13
Gambar 2. 1 Rapat Struktural BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu 21
Gambar 2. 2 Capaian Skor Kinerja Tahun 2022-2024 25
Gambar 3. 1 Penyerahan LHP Kinerja Tahun 2024 35

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. 1 Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu 8
Bagan 2. 1 Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu 17
Bagan 2. 2 Framework Renstra BPK 2020-2024 18

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2024 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu merupakan tolak ukur atas siklus implementasi akuntabilitas kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu untuk periode Tahun 2024 dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan strategis BPK sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024. Laporan ini memuat pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Selama Tahun 2024 sebagai bentuk pelaporan dan bahan evaluasi dalam upaya perbaikan manajemen kinerja di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Secara garis besar, pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menunjukkan skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu untuk Tahun 2024 sebesar **100,01**. Masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2024.

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi media evaluasi dalam mengukur serta menilai kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dan menentukan langkah serta kebijakan selanjutnya untuk mendukung perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bengkulu, 31 Januari 2025
BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu
Kepala Perwakilan,

Muhamad Toha Arafat
NIP. 197212271997031003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 dan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 13 yang menyatakan bahwa instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah unit organisasi eselon I pada kementerian/lembaga dan unit kerja mandiri yang ditetapkan.

B. Tugas dan Fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

BPK merupakan satu lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam UU tersebut, BPK dibantu oleh Pelaksana BPK yang salah satu diantaranya adalah BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu yang berada di bawah Auditorat Keuangan Negara (AKN) V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara V. BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Bengkulu, kota/kabupaten di Provinsi Bengkulu, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN V.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan evaluasi rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan mengidentifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;

3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
4. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan;
10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
13. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. Penyiapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
16. Pengelolaan SDM, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
17. Pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
18. Penyusunan Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu; dan
19. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen tersebut BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu sebagai satuan kerja menyusun Laporan Kinerja.

C. Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

Bagan 1. 1 Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

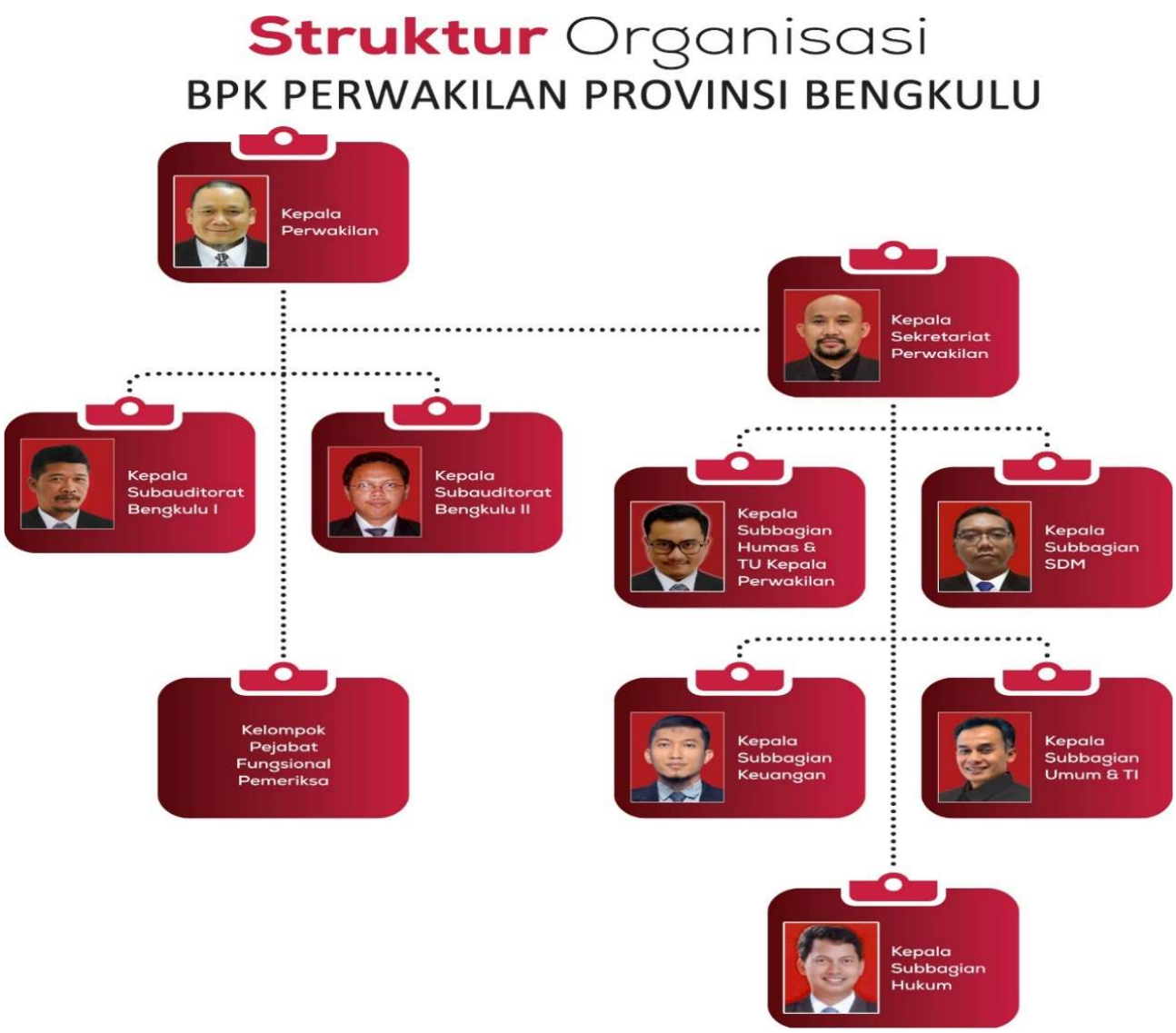

Keterangan:

No.	Jabatan	Nama
1	Kepala Perwakilan	Muhamad Toha Arafat, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA., CFrA.
2	Kepala Sekretariat Perwakilan	Maula Rusindrawan, S.Kom., ENSA., M.M., CertDA.
3	Kepala Subauditorat Bengkulu I	Ranni Agriadi, S.E., M.Si., Ak., CA.
4	Kepala Subauditorat Bengkulu II	Ronald Sinaga, S.E., MIM., Ak., CA., CSFA.
5	Kasubag Humas dan TU Perwakilan	Medy Oktrian, S.I.Kom., M.E.
6	Kasubag SDM	Yuga Prabhowo, S.E., M.A., M.S.E.
7	Kasubag Keuangan	Zuniar Viki Fardiyanta, S.ST.
8	Kasubag Umum dan TI	Iwan Sukma Permana, S.T., M.M.
9	Kasubag Hukum	Sandi Indra Prasetya, S.H., LLM.

Tabel 1. 1 Pejabat Struktural BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

Sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi AKN V yang terdiri dari:

1. **Subauditorat Bengkulu I**

   Subauditorat Bengkulu I mempunyai tugas:

   a. Pada lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

      1) Merumuskan rencana kegiatan;
      2) Mengusulkan tim pemeriksa;
      3) Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
      4) Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
      5) Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
      6) Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      7) Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;

8) Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9) Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10) Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11) Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP; dan

b. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.

2. Subauditorat Bengkulu II

Subauditorat Bengkulu II mempunyai tugas:

a. Pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Lebong, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

1) Merumuskan rencana kegiatan;
2) Mengusulkan tim pemeriksa;
3) Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
4) Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
5) Menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan dprd tentang hasil pemeriksaan;
6) Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pemeriksa bpk, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama bpk, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7) Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan ihps, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh pemeriksa bpk maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama bpk;
8) Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
9) Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
10) Menyiapkan bahan perumusan pendapat bpk yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
11) Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi smp dan dep; dan

b. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.

3. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
b. Pengurusan SDM, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
c. Pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
d. Penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
e. Pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu; dan
f. Penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu; dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Sekretariat Perwakilan Provinsi Bengkulu terdiri atas:

a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.
b. Subbagian Sumber Daya Manusia yang mempunyai tugas melaksanakan pengurusan sumber daya manusia di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.
c. Subbagian Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.
d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi yang mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu; dan

e. Subbagian Hukum melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, bantuan dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.

D. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) yang ada pada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu posisi per 31 Desember 2024 berjumlah 123 orang meliputi sembilan personil struktural (7%) yang terdiri dari satu Kepala Perwakilan, dua Kepala Subauditorat, satu Kepala Sekretariat Perwakilan, dan lima Kepala Subbagian, 15 personil di unit kerja penunjang pendukung (12%), 76 personil di unit kerja pemeriksaan/auditorat (62%). BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu juga memiliki pegawai tidak tetap (tenaga kontrak) sebanyak 22 orang (18%) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak satu orang (1%) sehingga total seluruhnya 123 pegawai.

Berdasarkan jenjang pendidikan, SDM BPK Perwakilan Bengkulu terdiri dari: sebanyak satu orang berjenjang pendidikan S3 (1%), 16 orang berjenjang pendidikan S2 (12%), 82 orang berjenjang pendidikan S1 (63%), 12 orang berjenjang pendidikan D3 (9%), serta sisanya 20 orang berjenjang pendidikan setingkat SMU/SMK/SMEA (15%).

Berdasarkan jenis kelamin, SDM BPK Perwakilan Bengkulu terdiri dari 76 orang pria (62%) dan 47 orang wanita (38%).

Berdasarkan Jabatan Fungsional Pemeriksa dengan jumlah 82 orang terdiri atas tiga orang Pemeriksa Madya (4%), empat Pemeriksa Muda (5%), dan 75 orang Pemeriksa Pertama (91%).

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah	Persentase
1.	Personil Struktural	9	7%
2.	Personil Unit Kerja Pemeriksaan	76	62%
3.	Personil Unit Kerja Penunjang	15	12%
4.	Pegawai Tidak Tetap	22	18%
5.	PPPK	1	1%
Jumlah		**123**	**100%**

Tabel 1. 2 Jumlah Posisi Pegawai

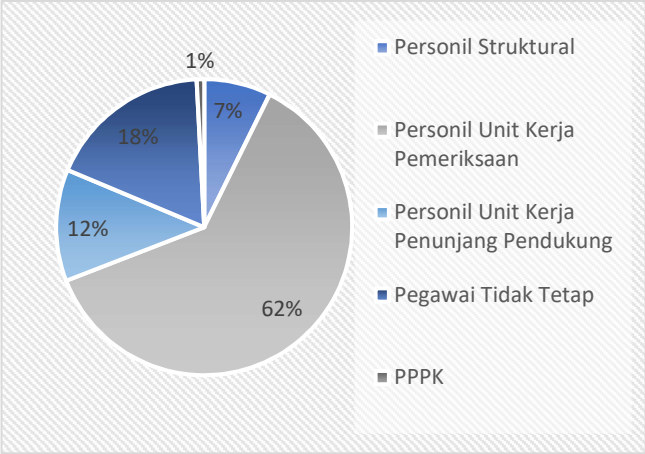

Gambar 1. 1 Jumlah Posisi Pegawai

No.	Uraian Jabatan	Jumlah	Persentase
1.	Pemeriksa Madya	2	2%
2.	Pemeriksa Muda	7	6%
3.	Pemeriksa Pertama	67	54%
Jumlah		**76**	**100%**

Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Pemeriksa

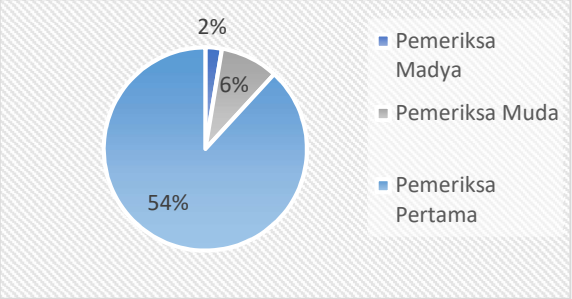

Gambar 1. 2 Jumlah Pegawai Pemeriksa

No.	Uraian Gender	Jumlah	Persentase
1.	Pria	76	62%
2.	Wanita	47	38%
Jumlah		**123**	**100%**

Tabel 1. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender

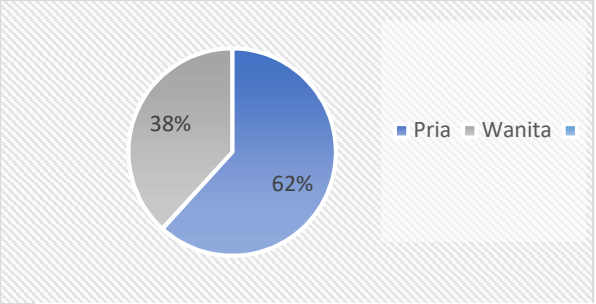

Gambar 1. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender

No.	Uraian Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	S3	1	1%
2.	S2	18	15%
3.	S1/D4	75	61%
4.	D3	14	11%
5.	SMU/SMEA/ SMK	15	12%
Jumlah		**123**	**100%**

Tabel 1. 5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

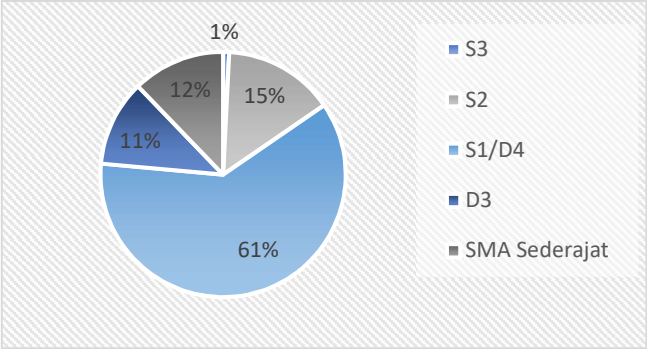

Gambar 1. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

2. Sumber Daya Keuangan

Selama periode TA 2024 satuan kerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dari penetapan awal. Pagu awal pada DIPA TA 2024 sebesar Rp22.420.301.000,00, sedangkan setelah revisi terakhir menjadi sebesar Rp24.319.251.000,00. Hal ini disebabkan oleh adanya pergeseran anggaran antar satker dalam lingkup Badan Pemeriksa Keuangan TA 2024.

Perubahan estimasi pendapatan dan anggaran belanja TA 2024 berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Revisi
	Belanja Negara	**22.420.301.000**	**21.432.479.000**
1.	Belanja Pegawai	7.595.712.000	6.668.890.000
2.	Belanja Barang	14.174.142.000	14.197.237.000
3.	Belanja Modal	650.447.000	627.352.000

Tabel 1. 6 Perbandingan Anggaran Awal dan Anggaran Revisi

Sedangkan total anggaran terhadap realisasi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu berdasarkan DIPA TA 2024 adalah sebagai berikut:

URAIAN		TA 2024		% thd Angg
		ANGGARAN	REALISASI	
1.	Belanja Pegawai	6.668.890.000	6.662.694.472	99,91
2.	Belanja Barang	14.197.237.000	14.142.273.650	99,61
3.	Belanja Modal	627.352.000	627.352.000	100
4.	**Jumlah Belanja**	**21.432.479.000**	**21.432.320.122**	**99,72**

Tabel 1. 7 Persentase Realisai terhadap Anggaran TA 2024

E. Isu Strategis

Isu-isu strategis yang perlu diperhatikan dari BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu yang akan perlu diperhatikan dalam mencapai visi dan misi, meliputi hal-hal berikut:

1. Pemeriksaan perlu lebih merespon isu strategis/isu publik yang menjadi perhatian pemangku kepentingan;
2. Pemeriksaan perlu didukung dengan implementasi *best practice* dan peningkatan konsistensi penerapan standar;
3. Sinergi dan kolaborasi pemeriksaan antar satker dengan pihak lain yang terkait perlu lebih dioptimalkan;
4. Pengimplementasian dan pemanfaatan *big data analytics* perlu lebih dioptimalkan;
5. Keterlibatan BPK dalam pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat;
6. Capaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan masih rendah;
7. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Bengkulu;
8. Mekanisme pemantauan dampak hasil pemeriksaan belum ada; dan

9. Kebutuhan Pemeriksa yang memiliki Peran Ketua Tim dan Staf Penunjang belum mencukupi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menetapkan Rencana Stategis tahun 2020-2024 yang berisikan berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan kelembagaan, serta target ukuran pencapaiannya yang sejalan dengan Rentra BPK Wide. BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu sebagai bagian dari BPK, mendukung visi, misi dan tujuan strategis serta melaksanakan nilai dasar BPK sebagaimana dijabarkan berikut ini:

1. Visi BPK yaitu Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.
2. Misi BPK yaitu a) memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan; b) mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan c) melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.
3. Nilai Dasar BPK, pencapaian cita-cita yang tertuang dalam visi dan misi akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai dengan berlandaskan pada nilai-nilai sebagai berikut:
    a. Independensi, BPK menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.
    b. Integritas, BPK membangun nilai integritas mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.
    c. Profesionalisme, BPK membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.
4. Tujuan Strategis yaitu “Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”. Tujuan tersebut membawa semangat bahwa pelaksanaan mandat pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara harus memberikan dampak positif bagi para pemangku kepentingan. Hasil pemeriksaan BPK harus memberikan dampak peningkatan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

5. Sasaran Strategis, dalam mendukung pencapaian visi dan tujuan strategis BPK tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menetapkan sasaran strategis yaitu "Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi". Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis ini diperlukan penyempurnaan pada proses internal BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu terkait peningkatan kualitas pemeriksaan, dan peningkatan layanan pemeriksaan. Penyempurnaan proses internal ini akan dapat terwujud melalui penguatan modal dasar organisasi meliputi peningkatan kualitas organisasi, peningkatan kompetensi pegawai, dan peningkatan kinerja anggaran di lingkungan BPK Provinsi Bengkulu. Keseluruhan strategi tersebut merupakan sasaran-sasaran strategis yang saling berkaitan dan mendukung satu

Bagan 2. 1 Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

B. Arah Kebijakan dan Strategi Organisasi

Arah kebijakan adalah kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan sehingga tujuan strategis tercapai. BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mendukung arah kebijakan BPK dalam Renstra 2020-2024 sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Bagan 2. 2 Framework Renstra BPK 2020-2024

Arah Kebijakan 1 : Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi menjadi lembaga negara yang ingin menjadi pemeran aktif tepercaya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas untuk mencapai tujuan negara, arah kebijakan BPK yang pertama ditekankan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:

Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis

Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif

Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 5 – Menguatkan Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara.

Arah kebijakan 2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi.

Keberhasilan tercapainya arah kebijakan pemeriksaan dapat diwujudkan jika mendapat dukungan tata kelola organisasi yang baik. Oleh sebab itu, arah kebijakan yang kedua akan difokuskan pada

peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK. Strategi yang akan dilaksanakan pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan.

Target kinerja merupakan target pencapaian Sasaran Strategis Satker dalam peta strategis masing-masing satker selama lima tahun ke depan. Di samping itu dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan strategis dan sasaran strategis, Perwakilan Provinsi Bengkulu menetapkan ukuran keberhasilannya (IKU) sebagai berikut.

Tujuan Strategis	IKU		Target				
			2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat							
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%
	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%
	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%
	5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
	6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%
	7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	4,81
	8	Hasil Evaluasi AKIP	A 86,00	A 87,00	A 88,00	A 89,00	AA 90,05
	9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	98%
	10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%
	11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	(3,80)	(3,80)	(3,80)	(3,80)	(3,80)
	12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%
	13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	87%	87%	88%	88,5%	84,5%

Tabel 2. 1 Target Indikator Kinerja Perwakilan Provinsi Bengkulu

C. Perjanjian Kinerja

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target pencapaian IKU. IKU beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Provinsi Bengkulu selaku Eselon II dan Pejabat Eselon I (dhi. Auditor Utama Keuangan Negara V). Berikut Sasaran Strategis, IKU dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2024:

Sasaran Strategis	Sasaran	Indikator Kinerja		Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	• Meningkatnya kualitas pemeriksaan • Meningkatnya layanan pemeriksaan	IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
		IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
		IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
		IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
		IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
		IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
		IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	4,81
		IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	AA 90,05
		IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%
		IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
		IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	(3,80)
		IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
		IKU 13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	84,5%

Tabel 2. 2 Target IKU BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2024

Gambar 2. 1 Rapat Struktural BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

D. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2024

Rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu merupakan penjabaran lebih lanjut atas rencana pelaksanaan perjanjian kinerja Tahun 2024 yang dituangkan secara berkala selama triwulanan dengan penjabaran Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP selama bulanan dalam rangka pencapaian target kinerja sesuai dengan target pencapaian IKU Tahun 2024.

Rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dimuat dalam dokumen rencana aksi Tahun Anggaran 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Provinsi Bengkulu. Berikut aktivitas utama BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu sesuai dengan dokumen rencana aksi Tahun 2024:

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama(IKU)		Aktivitas Utama Rencana Aksi
IKU 1	Pemenuhan Pengendaliandan PemerolehanKeyakinan Mutu Pemeriksaan	1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan Tahun 2024 sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melaluipemenuhan *Quality Control* (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan *Quality Assurance* (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP); 2. Meningkatkan QC dari PT dan PJ melalui laporan mingguan dan diskusi mingguan pada pemeriksaan tahun 2024; 3. Melakukan Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan melalui hasil *Quality Control* (QC) dan *Quality Assurance* (QC) serta menindaklanjuti hasil evaluasi EPP dan reviu Itama.

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama(IKU)		Aktivitas Utama Rencana Aksi
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaanyang Memenuhi Harapan Penugasan	Melakukan evaluasi atas kesesuaian simpulan dalam LHP dengan harapan penugasan yang tertuang dalam P2 terhadap setiap LHP yang dihasilkan.
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	1. Memantau dan Melaksanakan Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sampai dengan Semester II 2024 (akhir periode bulan berjalan); 2. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SMP dan SIPTL; 3. Kegiatan Verifikasi dan Validasi dokumen TL melalui SIPTL; 4. Verifikasi dan validasi TL atas penyelesaian Tindak Lanjut yang terhambat penyelesaian statusnya kedalam status Telah Selesai (TS).
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam PemeriksaanTematik Nasional	1. Menyusun pengelolaan strategi rencana pemeriksaan tematik nasional yang disusun berdasarkan isu strategis, RPJMN/D, dan SDG's; 2. Menyiapkan rencana pemeriksaan tematik nasional yang disusun berdasarkan isu strategis, RPJMN/D, dan SDG's; 3. Melaksanakan Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Kepatuhan sesuai tema yang telah ditetapkan oleh Auditorat Keuangan Negara dengan mempertimbangkan isu strategis, RPJMN/D, dan SDG's.
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaandari Para Pemangku Kepentingan	1. Menyusun strategi pengelolaan rencana pemeriksaan berdasarkan permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan; 2. Menindaklanjuti permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan.
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	1. Menyusun pengelolaan strategi rencana pemeriksaan yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik local dan melaksanakan perencanaan tema Pemeriksaan Kinerja *Long Form Audit Report* (LFAR) yang bersumber dari isu-isu strategis di daerah serta RPJMD dan SDG's; 2. Menyiapkan rencana pemeriksaan yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik local berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's; 3. Melaksanakan rencana pemeriksaan yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik local berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.
IKU 7	Indeks ImplementasiNilai Dasar BPK	Meningkatkan pemahaman serta melakukan internalisasi nilai dasar, visi, dan misi BPK sebagaimana tertuang dalam renstra satker pada setiap kesempatan kepada pegawai BPK.
IKU 8	Hasil EvaluasiAKIP	1. Menyusun rencana aksi pencapaian Kinerja Triwulanan sesuai dengan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja; 2. Melakukan penilaian mandiri evaluasi implementasi SAKIP di Lingkungan BPK Perwakilan; 3. Menatausahakan bukti pendukung pencapaian kinerja secara tertib; 4. Menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Triwulanan secara tepat waktu;

Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama(IKU)		Aktivitas Utama Rencana Aksi
		5. Melakukan rapat evaluasi pencapaian Kinerja.
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	1. Pimpinan mendorong pelaksanakan tupoksi dengan memanfaatkan layanan TI yang telah disediakan kepada seluruhpegawai, seperti memaksimalkan penggunaan email perwakilan, memanfaatkan aplikasi persuratan, dsb (SiSDM, SMP, SiAP, SIPTL dan JASMIN); 2. Menggunakan email BPK untuk semua tugas kedinasan.
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	1. Evaluasi Penerapan *Best Practice* tahun 2023; 2. Inventarisir usulan *Best Practice* Tahun 2024 di Perwakilan; 3. Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan; 4. Melaksanakan MP berupa KTF, Diklat, *Coaching* dan Mentoring.
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentinganatas KualitasKomunikasi	1. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan Bengkulu salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit; 2. Melakukan Survei tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan.
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	1. Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dariBadan/Balai Diklat; 2. Mengajukan proposal permohonan diklat kompetensi bagi pegawai; 3. Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topikpengembangan kompetensi pegawai; 4. Melaksanakan Pengembangan Kompetensi dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi pemeriksa dan non pemeriksa.
IKU 13	Tingkat Kinerja Anggaran	1. Mengoptimalkan Pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK; 2. Menindaklanjuti dan Melaksanakan upaya perbaikan atas hasil evaluasi kinerja dan pelaksanaan anggaran oleh biro keuangan; 3. Menyusun Dokumen penganggaran dan Pemantauan atas pelaksanaan realisasi Anggaran

Tabel 2. 3 Aktivitas Rencana Aksi Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Hasil Evaluasi AKIP

Pada Tahun 2024 BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu melakukan *self-assesment* atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan periode reviu AKIP Tahun 2024 sebagai berikut:

No.	Komponen/Subkomponen	Bobot	Nilai
1	**Perencanaan Kinerja**	**30,00**	**27,60**
2	**Pengukuran Kinerja**	**30,00**	**27,00**
3	**Pelaporan Kinerja**	**15,00**	**12,90**
4	**Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**	**25,00**	**23,00**
Nilai AKIP Tahun 2023		**100,00**	**90,50**

Tabel 3. 1 Hasil Evaluasi Self-Assesment AKIP Perwakilan Bengkulu Tahun 2024

Secara keseluruhan, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mendapatkan nilai 90,50 (AA) dengan predikat sangat memuaskan. Nilai tersebut menurun dari nilai AKIP tahun 2023 yang mendapatkan nilai 91,40 (AA). Hal ini diakibatkan belum terpenuhinya seluruh kriteria pada komponen Pelaporan Kinerja secara optimal yang disajikan pada LAKIN BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2023. BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu akan terus berupaya melakukan perbaikan serta melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja setiap tahunnya dan juga akan memanfaatkan reviu LAKIN untuk menyempurnakan perencanaan kinerja tahunan tahun berikutnya.

Adapun catatan, Rekomendasi dan tindak lanjut yang sudah BPK Perwakilan Bengkulu lakukan selama tahun 2024 terkait dengan evaluasi penilaian AKIP tahun 2024 sebagai berikut:

No.	Komponen/ Subkomponen/ Catatan	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi 2024 yang Dilaksanakan Unit Kerja/Satuan Kerja
		2024	2024	
1	**Pelaporan Kinerja**	BPK perwakilan Provinsi Bengkulu belum memenuhi	Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu agar	BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu sudah

No.	Komponen/ Subkomponen/ Catatan	Catatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi 2024 yang Dilaksanakan Unit Kerja/Satuan Kerja
		2024	2024	
		kriteria pada Komponen Pelaporan Kinerja secara optimal yaitu LAKIN Perwakilan Provinsi Bengkulu tahun 2023 belum sepenuhnya menyajikan seluruh informasi terkait upaya-upaya yang telah mendukung capaian/kegagalan pada setiap target IKU.	meningkatkan kualitas penyusunan LAKIN tahun 2024 dengan menambahkan informasi kualitas atas upaya nyata yang telah dilakukan untuk setiap target IKU.	menambahkan Informasi atas upaya nyata yang telah dilakukan untuk setiap target IKU, terutama untuk target IKU yang belum mencapai target pada tahun 2024.

B. Capaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

Capaian skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu untuk Tahun 2024 berdasarkan hasil validasi yaitu sebesar **100,01**. Skor tersebut mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2023 yaitu sebesar 99,29 dan 2022 sebesar 98,96.

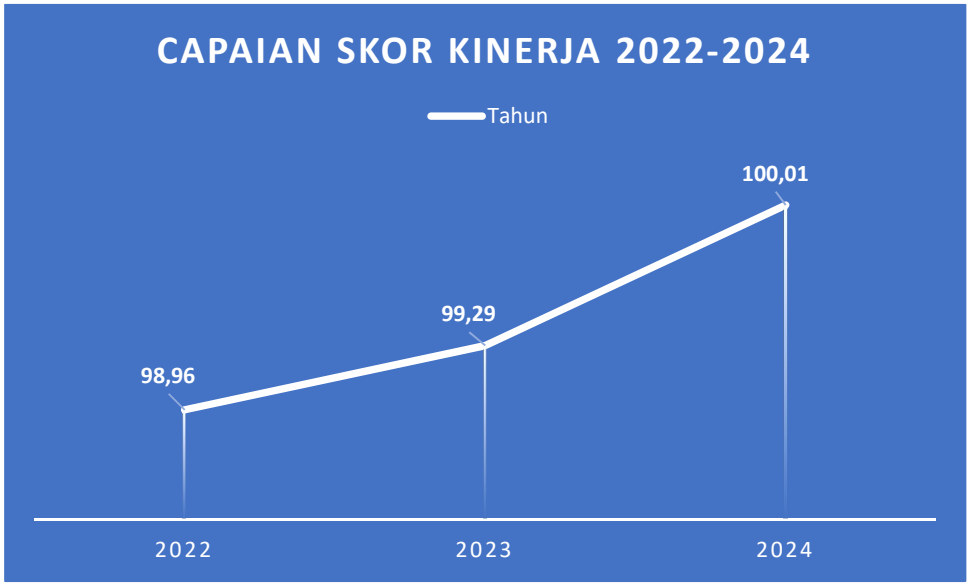

Gambar 2. 2 Capaian Skor Kinerja Tahun 2022-2024

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa tren mengalami peningkatan skor capaian kinerja dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Hal ini didukung oleh Perwakilan Provinsi Bengkulu yang telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja meliputi:

1. Pemeriksaan LKPD pada 11 entitas di wilayah Provinsi Bengkulu di semester I tahun 2024;
2. Melaksanakan empat pemeriksaan tematik nasional pada entitas Provinsi Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Bengkulu Utara pada semester II Tahun 2024;
3. Melaksanakan satu pemeriksaan tematik lokal pada entitas Kota Bengkulu pada Semester II Tahun 2024;
4. Melakukan dua Pemeriksaan Mandiri/Portofolio Pada entitas Provinsi Bengkulu dan BPD Bengkulu;
5. Pemeriksaan interim LKPD TA 2024 pada entitas Provinsi Bengkulu;
6. Melaksanakan enam kegiatan manajemen pengetahuan yaitu masing-masing berupa satu kegiatan Coaching, Mentoring, Diklat, dua kegiatan *Peer Assis* dan satu kegiatan *Knowledge Transfer Forum* (KTF); dan
7. Melaksanakan dua kali kegiatan pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK pada semester I dan Semester II Tahun 2024.

Capaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu untuk Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Skor Capaian 2024
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	91,27%	91,27
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	74,88%	99,84
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100,72
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100,33
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	4,81	4,88	101,46
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	90,05	90,50	100,50
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%	91,36%	97,12
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	102,11
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	4,42	105

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Skor Capaian 2024
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100
IKU 13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	84,50%	92,50%	105

Tabel 3. 2 Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2024

Adapun perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2024 dengan realisasi dua tahun terakhir sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024
IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	91,27%	100%	83,64%
IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%
IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	74,88%	75%	75,21%
IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100,72%	100%	101,59%
IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%
IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100,33%	100%	102,34%
IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	4,81	4,88	5	4,71
IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	90,05	90,50	89	91,40
IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	98%	95,18%	100%	98,39%
IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	102,11%	100%	100,71%
IKU 11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	4,42	3,80	3,66
IKU 12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%
IKU 13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	84,50%	92,50%	88,50%	90,24%

Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi Pencapaian Kinerja Tahun 2023 dan 2024

Selanjutnya, perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2024 dengan target akhir Renstra 2024 sebagai berikut:

IKU		Target					Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun 2024 terhadap Target Akhir Rensta (Tahun 2024)
		2020	2021	2022	2023	2024		
1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	91,27%	91,27%
2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%	75%	75%	75%	75%	74,88%	99,84%
4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,72%
5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,33%
7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	4,81	4,88	101,46%
8	Hasil Evaluasi AKIP	A 86,00	A 87,00	A 88,00	A 89,00	AA 90,05	90,50	100,50%
9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	98%	91,36%	97,12%
10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	102,11
11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	(3,80)	(3,80)	(3,80)	(3,80)	(3,80)	4,42	105
12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
13	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	83%	83,5%	84%	84,5%	84,5%	92,50%	105

Tabel 3. 4 Realisasi Tahun 2024 dengan target akhir Renstra 2024

Secara keseluruhan, capaian Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2024, terdapat 3 (tiga) IKU yang belum mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu:
    a. IKU 1 Tingkat Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
    b. IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan; dan
    c. IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi.
2. Terdapat 3 (tiga) IKU yang telah mencapai sama/sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu:
    a. IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan;
    b. IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan; dan
    c. IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi;
3. Terdapat 7 (tujuh) IKU yang telah melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu:
    a. IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional;
    b. IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal;
    c. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK;
    d. IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP;
    e. IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan;
    f. IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi.
    g. IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran.

Berikut adalah pencapaian IKU Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2024:

IKU 1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Indikator ini menunjukkan ini sejauh mana pemeriksaan BPK telah dilaksanakan sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan *Quality Control* (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP), Pemenuhan *Quality Assurance* (QA) dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP) serta hasil evaluasi EPP dan hasil reviu Itama. Hasil Evaluasi EPP merupakan evaluasi atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan. Hasil Reviu Itama merupakan penilaian terhadap dokumentasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan yang dilakukan pada Seluruh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan metode sampling. Indikator ini bertujuan untuk untuk mendorong kualitas pengendalian mutu pemeriksaan.

Tabel 3. 5 Perkembangan Capaian IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan Tahun 2020 - 2024

IKU 1. Tingkat Pemenuhan Pengendalian Dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	84,69%	88,33%	89,17%	83,64%	91,27%

IKU 1. Tingkat Pemenuhan Pengendalian Dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Capaian	84,69	88,33	89,17	83,64	91,27
Persentase Realisasi Tahun 2020-2023 Terhadap Target Tahun 2024	**84,69%**	**88,33%**	**89,17%**	**83,64%**	**91,27%**

Realisasi IKU 1 Tingkat Pemenuhan Pengendalian Dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan perwakilan Provinsi Bengkulu tahun 204 adalah sebesar 91,27% atau mendapatkan skor 91,27. hal tersebut belum mencapai target yang sudah ditetapkan dalam dokumen Renstra Perwakilan Tahun 2020 - 2024 yaitu sebesar 100%.

Capaian IKU I mengalami kenaikan apabila dibandingkan tahun 2023 yang mendapatakan capaian 83,64%. Analisis mengenai penyebab tidak tercapainya target kinerja IKU 1 adalah sebagai berikut:

a. Penyebab

   Realisasi capaian IKU 1 belum dapat memenuhi target ini disebabkan oleh hasil evaluasi Direktorat EPP atas LHP Perwakilan Provinsi Bengkulu yang mendapatkan nilai 91,27. Bila dirinci lebih lanjut, kekurangan nilai tersebut disebabkan oleh persentase penilaian tingkat konsistensi atas LHP sebesar 63,64%. Hal ini mengindikasikan bahwa masih terdapat beberapa unsur temuan berupa nilai/angka yang belum konsisten antara judul, kondisi, akibat, rekomendasi, dan lampiran.

b. Alternatif yang dilakukan

   Perwakilan Provinsi Bengkulu pada tahun 2024 sudah membentuk Tim *Checker* (memberdayakan pemeriksa khusus) berdasarkan Instruksi Kepala Perwakilan Nomor 1/IK/XVIII.BKL/5/2024 tentang Penugasan Para Pegawai sebagai Tim *Checker* Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023, daftar pelaksana penjamin mutu berisi pegawi yang mempunyai ketelitian dan keahlian dalam melakukan pengecekan terutama akurasi dan konsistensi untuk meningkatkan perhatian pada kesalahan konsistensi dan akurasi yang terjadi pada tahun sebelumnya guna meningkatkan kinerja reviu konsep LHP secara redaksional dan berjenjang sebelum diterbitkannya LHP.

Selama Periode Tahun 2024, Perwakilan Bengkulu telah melaksanakan 11 Pemeriksaan LKPD yang meliputi Pemeriksaan LK Kabupaten/Kota/Provinsi di Lingkungan Provinsi Bengkulu, empat pemeriksaan tematik nasional, tiga pemeriksaan tematik lokal dan satu pemeriksaan Interim Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya untuk meningkatkan capaian atas IKU 1, Perwakilan Provinsi Bengkulu akan terus memperdayakan pegawai sebagai tim Checker atau pelaksana penjamin mutu atas kualitas LHP di

Perwakilan Provinsi Bengkulu, dan juga sebagai Salah satu bentuk pengendalian yang telah dilakukan pada tahun 2024 untuk menjamin mutu dan kualitas pemeriksa adalah dengan dilakukannya pengendalian melalui formulir *Quality Assurance* dan *Quality Control*.

Realisasi IKU 1 telah mencapai 91,27% dari target tahun 2024 sebesar 100%. Dengan menerapkan berbagai langkah diatas, diharapkan target IKU ini dapat dicapai seluruhnya pada tahun 2025.

IKU 2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian Simpulan dalam LHP yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2). Indikator ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas LHP.

Tabel 3. 6 Perkembangan Capaian IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan *yang Memenuhi Harapan Penugasan* Tahun 2020 - 2024

IKU 2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%
Capaian	100	100	100	100	100
Persentase Realisasi Tahun 2020-2023 Terhadap Target Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%

Realisasi IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan pada tahun 2024 adalah sebesar 100% dari target sebesar 100% sehingga capaiannya sebear 100. Hal ini mengindikasihan bahwa sudah terdapat kesesuaian hasil evaluasi EPP atas kesesuaian hasil pemeriksaan dengan harapan penugasan.

Realisasi IKU ini pada tahun 2024 sama dengan tahun sebelumnya, ketercapaian tersebut didukung oleh penyusunan Program Pemeriksaan (P2) dilakukan sesuai harapan penugasan pemeriksaan yang akan dilaksanakan.

Selanjutnya, langkah strategis yang diperlukan guna mempertahankan capaian ini, Perwakilan Provinsi Bengkulu akan terus menghimbau agar penyusunan Program Pemeriksaan (P2) dilakukan secara lebih teliti, cermat serta efektif, agar memberikan kesesuaian terhadap harapan penugasan atas laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan

Realisasi IKU 2 telah mencapai 100% dari target tahun 2024 yaitu sebesar 100%. Diharapkan capaian ini dapat dipertahankan hingga tahun 2025.

IKU 3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan *auditee* atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Tabel 3. 7 Perkembangan Capaian IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2020 – 2024

IKU 3. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	75%	75%	75%	75%	75%
Realisasi	67,72%	69,86%	73,57%	75,21%	74,88%
Capaian	90,29	93,14	98,09	100,28	99,84
Persentase Realisasi Tahun 2020-2023 Terhadap Target Tahun 2024	90,29%	93,14%	98,09%	100,28%	99,84%

Realisasi IKU 3 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan tahun 2024 adalah sebesar 74,88% dari target 75%, sehingga capainya sebesar 99,84%. Hal ini mengindikasikan bahwa Perwakilan Provinsi Bengkulu masih perlu upaya perbaikan dalam melaksanakan kegiatan yang menunjang kenaikan persentase TLRHP pada entitas se-Provinsi Bengkulu.

Realisasi IKU ini pada tahun 2024 lebih rendah bila dibandingkan tahun 2023. Ketercapain tersebut disebabkan oleh Perwakilan Provinsi Bengkulu yang masih kurang optimal dalam melakukan pembahasan TLRHP dengan seluruh pihak Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Bengkulu juga masih banyak terdapat rekomendasi yang terdapat pada status 3, sehingga hal tersebut mempengaruhi dalam perhitungan untuk komponen IKU ini.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses penyelesaian tindak lanjut, pada tahun 20224 Perwakilan Provinsi Bengkulu selain mengimplementasikan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK (SiPTL), juga membuka ruang konsultasi melalui helpdesk TLRHP dan mendorong kepada entitas untuk menginventarisir tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun-tahun yang telah lama agar segera dapat diselesaikan, baik yang mudah ditindaklajuti menjadi status 1 (selesai ditindaklanjuti) maupun yang sulit ditindaklanjuti

menjadi status 4 (tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah) dengan didukung dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu juga mengadakan kegiatan pemantauan TLRHP BPK selama 2 kali pada tahun 2024 dengan mengundang seluruh Pemda se-Provinsi Bengkulu untuk membahas TLRHP yang belum selesai atau proses.

Sampai dengan periode semester I tahun 2024 terdapat 12.493 rekomendasi yang telah disampaikan ke Pemerintah Daerah. Dari jumlah tersebut terdapat 9.286 rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti (74,33%), 3.001 rekomendasi yang belum selesai atau masih dalam proses (24,02%), 137 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (1,10%), dan 69 rekomendasi tidak bisa ditindaklanjuti (0,55%).

Untuk menaikkan capaian atas IKU 3, Perwakilan Provinsi Bengkulu akan berupaya untuk terus mendorong pemerintah daerah serta melakukan kegiatan pemantauan kegiatan TLRHP setiap semesternya.

Realisasi IKU 3 belum mencapai target tahun 2024. Dengan menerapkan berbagai langkah diatas, diharapkan capaian ini dapat dipertahankan hingga tahun 2024.

Gambar 3.1 Kegiatan Pemantauan TLRHP di BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu untuk Semester I Tahun 2024

IKU 4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

IKU ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai

dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu satker sebagai koordinator. Signifikansi pemeriksaan adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional. Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's.

Tabel 3. 8 Perkembangan Capaian IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional Tahun 2020 – 2024

IKU 4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satker Dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	101,14%	100,52%	100,57%	101,59%	100,72%
Capaian	101,14%	100,52%	100,57%	101,59%	100,72%
Persentase Realisasi Tahun 2020-2023 Terhadap Target Tahun 2024	101,14%	100,52%	100,57%	101,59%	100,72%

Realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional Tahun 2024 adalah sebesar 100,72% dari target sebesar 100% sehingga capaiannya adalah sebesar 100,72%. Hal ini mengindikasikan bahwa Perwakilan Provinsi Bengkulu sudah secara aktif untuk turut serta dalam melaksanakan pemeriksaan yang menjadi tema pada tematik nasional tahun 2024.

Realisasi IKU ini pada tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Ketercapaian tersebut didukung pada Semester II Tahun 2024, Perwakilan Provinsi Bengkulu telah melaksanakan empat pemeriksaan yang termasuk ke dalam pemeriksaan signifikan lainnya yang secara nasional meliputi:

1. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Keuangan Pemilihan Umum 2024 Periode Tahun 2023 s.d Semester I Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum di Wilayah Provinsi Bengkulu;
2. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Air Untuk Mendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023 s.d Semester I Tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Arga Makmur;
3. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Dalam Melaksanakan Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Air Tahun 2023 s.d Semester I Tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dan Instansi Terkait Lainnya di Curup; dan

4. Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2023 s.d Semester I 2024 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Instansi Terkait Lainnya di Manna.

Gambar 3. 1 Penyerahan LHP Kinerja Tahun 2024

Tercapainya target Keterlibatan Satker Dalam Pemeriksaan Tematik Nasional disebabkan oleh upaya Perwakilan Provinsi Bengkulu untuk mengikuti Pemeriksaan Tematik yang menjadi tema nasional secara keseluruhan. Pada tahun-tahun berikutnya, Perwakilan Provinsi Bengkulu akan terus berupaya menyusun Rencana Kegiatan Pemeriksaan secara lebih cermat dan teliti dengan tetap menyesuaikan dengan Rencana Kegiatan Tahunan BPK dan sesuai dengan tema serta fokus pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh BPK. Selain hal tersebut, Perwakilan Provinsi Bengkulu juga terus berkomitmen dan mempersiapkan diri dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi para pemeriksa agar tetap mampu melaksanakan pemeriksaan tematik nasional pada periode yang akan datang.

Realisasi IKU 4 telah mencapai 100,72% dari target tahun 2024 yaitu sebesar 100%. Diharapkan capaian ini dapat dipertahankan hingga tahun 2025.

IKU 5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan Institusi Penegak Hukum (IPH). Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang ditindaklanjuti BPK.

Tabel 3. 9 Perkembangan Capaian Realisasi IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 - 2024

IKU 5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari para Pemangku Kepentingan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Realisasi Tahun 2020-2023 Terhadap Target Tahun 2024	100%	100%	100%	100%	100%

Belum terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH sampai dengan akhir Tahun 2024, sehingga tingkat pemenuhan pemeriksaan sampai dengan akhir Tahun 2024 masih sebesar 100%, sesuai dengan target tahunan.

IKU 6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

IKU ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D dan SDG's. Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Perwakilan minimal satu kali dalam periode Renstra. Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMN/D, dan SDG's.

Tabel 3. 10 Perkembangan Capaian Realisasi IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal Tahun 2020 - 2024

IKU 6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satker Dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100,96%	100%	100,33%
Capaian	100%	100%	100,96%	100%	100,33%
Persentase Realisasi Tahun 2020-2023 Terhadap Target Tahun 2024	100%	100%	100,96%	100%	100,33%

Sampai dengan periode Semester II Tahun 2024, terdapat tiga pemeriksaan Tematik Lokal yang telah dilaksanakan oleh Perwakilan Provinsi Bengkulu yaitu:

1. Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023 s.d Semester I Tahun 2024 pada Pemerintah Kota Bengkulu dan Instansi Terkait Lainnya di Bengkulu;
2. Pemeriksaan Kepatuhan atas Kegiatan Operasional Tahun Buku 2023 s.d 2024 (Triwulan III) pada PT Bank Pembangunan Daerah Bengkulu dan Instansi Terkait Lainnya di Bengkulu; dan
3. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dan 2024 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Instansi Terkait Lainnya di Bengkulu.

Realisasi IKU 6 sebesar 100,33% ini telah memenuhi target yang ditentukan dalam perjanjian kinerja yaitu sebesar 100% dan jumlah pemeriksaan telah sesuai dengan RKP yang disusun. Langkah yang akan dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang konsisten sampai periode selanjutnya, Perwakilan Provinsi Bengkulu akan lebih cermat dan lebih sensitif dalam menentukan tema pemeriksaan dengan tetap berpedoman pada tujuan pembangunan daerah maupun nasional yang tercantum dalam RPJMD. Selanjutnya capaian ini dapat dipertahankan hingga tahun 2025.

IKU 7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

IKU ini mengukur tingkat pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK. Skala hasil survei sebagai berikut:

a) 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
b) 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
c) 3,00 - 3,99 = memuaskan
d) 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami visi misi dan nilai dasar BPK.

Tabel 3. 11 Perkembangan Capaian Realisasi IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK Tahun 2020 - 2024

IKU 7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	5	5	5	5	4,81
Realisasi	4,54	4,38	4,91	4,71	4,88
Capaian	90,8%	87,6%	98,2%	94,2%	101,46%

IKU 7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Realisasi Tahun 2020-2023 Terhadap Target Tahun 2024	90,8%	87,6%	98,2%	94,2%	101,46%

Realisasi IKU Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK Tahun 2024 adalah sebesar 4,88 dari target sebesar 4,81 sehingga capaiannya sebesar 101,46%. Hal ini mengindikasikan bahkan Perwakilan Provinsi Bengkulu sudah maksimal untuk berupaya meningkatkan pemahaman visi, misi, dan nilai-nilai dasar bagi pegawai BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Realisasi IKU ini pada tahun 2024 lebih tinggi apabila dibandingkan tahun sebelumnya, ketercapaian tersebut didukung oleh kegiatan rutin berupa pengarahan Kepala Perwakilan kepada seluruh pegawai terkait penguatan implementasi nilai-nilai dasar BPK dan pemahaman visi dan misi BPK. Juga pejabat di BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu secara konsisten sudah memberikan teladan yang baik mengenai pengamalan nilai-nilai dasar BPK. Sehingga hal tersebut menjadi motivasi bagi seluruh pegawai dalam mengimplementasikan nilai-nilai dasar BPK.

Untuk mempertahankan capaian atas IKU Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK, Perwakilan Provinsi Bengkulu akan terus melakukan langkah berupa pengarahan Kepala Perwakilan kepada seluruh pegawai secara rutin dan juga mendorong para pegawai untuk terus meningkatkan pemahaman visi, misi dan mengamalkan nilai-nilai dasar BPK dimulai dari level teratas secara konsisten.

Realisasi IKU Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK telah melebihi target tahun 2024, dengan menerapkan berbagai langkah diatas, diharapkan capaian ini dapat dipertahankan hingga periode selanjutnya.

IKU 8. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil Evaluasi AKIP merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh Satuan Kerja di BPK. Sesuai Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015, nilai AKIP dikategorikan sebagai berikut:

- AA = Sangat Memuaskan (>90-100)
- A = Memuaskan (>80-90)
- BB = Sangat Baik (>70-80)
- B = Baik (>60-70)
- CC = Cukup (>50-60)
- C = Kurang (>30-50)
- D = Sangat Kurang (0-30)

Indikator ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja di BPK.

Tabel 3. 12 Perkembangan Capaian Realisasi IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2020 - 2024

IKU 8. Hasil Evaluasi AKIP	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	A (86,00)	A (87,00)	A (88,00)	A (89,00)	A (90,05)
Realisasi	91,80 (AA)	84,82 (A)	90,38 (AA)	91,40 (AA)	90,50 (AA)
Capaian	106,74%	97,49%	102,70%	102,69%	100,50
Persentase Realisasi Tahun 2020-2023 Terhadap Target Tahun 2024	101,94%	94,19%	100,36%	101,50%	100,50%

Pada tahun 2024, Perwakilan Provinsi Bengkulu telah memperoleh penilaian dari hasil evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Bengkulu Tahun 2024 dengan nilai 90,50 atau dengan predikat AA (Sangat Memuaskan) dari target 90,05 sehingga capaiannya 100,50%. Hal ini mengindikasikan bahwa BPK Perwakilan Provini Bengkulu sudah secara optimal dan konsisten terkait penyusunan dan penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja pada Tahun 2024.

Capaian tahun 2024 mengalami penurunan dari capaian tahun 2023 yang mendapatkan skor 91,40. Hal ini disebabkan terkait penilaian komponen pelaporan Kinerja yang belum secara optimal memenuhi kriteria dan belum sepenuhnya menyajikan seluruh informasi terkait upaya-upaya yang mendukung capaian/kegagalan pada setiap target IKU.

Adapun langkah yang ditempuh oleh Perwakilan Provinsi Bengkulu demi tercapainya target kinerja IKU 8 untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut.

a. Langkah yang dilakukan

   Menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja yang sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI No. 286/K/X-XIII.2/6/2017 tentang pelaporan kinerja pada unit-unit kinerja pelaksana BPK.

b. Alternatif yang sudah dilakukan

   BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu sudah melakukan perbaikan penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2023. BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu juga berkomitmen akan terus meningkatkan realisasi implementasi AKIP pada periode kedepan dengan melalui perbaikan yang dimulai dari Penyusunan Pernyataan Komitmen dan Perjanjian Kinerja (PKPK), pendokumentasian capaian IKU setiap Triwulannya hingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan dengan menyajikan informasi yang akuntabel dan relevan atas pelaksanaan kinerja yang telah dilaksanakan.

Realisasi IKU 8 telah mencapai 90,50 dari target 90,05 target tahun 2024. Dengan menerapkan berbagai langkah diatas, diharapkan target IKU ini meningkat pada periode selanjutnya.

IKU 9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan Kesekretariatan (SISDM, JASMIN) dan layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SIPTL). Selain itu, aplikasi ini juga memfasilitasi user untuk berinteraksi dan berbagi pengetahuan. Untuk mendorong IT *culture* di lingkungan BPK, seluruh satker diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal. IKU ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan TIK dalam rangka mendorong IT *culture* di BPK, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

Tabel 3. 13 Perkembangan Capaian Realisasi IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Tahun 2020 - 2024

IKU 9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	95%	96%	97%	98%	98%
Realisasi	99,04%	99,04%	90,54%	98,39%	95,18%
Capaian	103,16%	103,16%	93,34%	100,40%	97,12%
Persentase Realisasi Tahun 2020-2023 Terhadap Target Tahun 2024	99.04%	99,04%	90,54%	98,39%	95,18%

Pada tahun 2024, Perwakilan Provinsi Bengkulu memperoleh nilai tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dari Biro TI yaitu sebesar 95,18% dari target sebesar 98% sehingga capainya sebesar 97,12% hal ini mengindikasikan bahwa Perwakilan Provinsi Bengkulu masih kurang optimal dalam memanfaatakan layanan terkait Teknologi dan Informasi Tahun 2024.

Realisasi IKU ini pada tahun 2024 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, kegagalan tersebut disebabkan oleh masih kurang optimal penggunaan dan pemanfaatan Teknologi dan Informasi Tahun 2024 oleh seluruh pegawai di Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Adapun rincian IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi sebagai berikut (1) Tingkat Pemanfaatan Layanan Aplikasi SISDM sebesar 94,22%, (2) Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN sebesar 99,85%, (3) Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SMP sebesar 97,22% , (4) Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiAP sebesar 84,57% , (5) Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiPTL sebesar 100% atau dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Uraian Layanan	Nilai Pemanfaatan TIK
Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SISDM	94,22%
Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN	99,85%
Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SMP	97,22%
Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiAP	84,57%

Uraian Layanan	Nilai Pemanfaatan TIK
Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiPTL	100%
Rata-rata pemanfaatan TIK	**95,18%**

Dari hasil evaluasi Biro TI di atas diketahui bahwa Perwakilan Provinsi Bengkulu belum optimal dalam pemanfaatan layanan aplikasi SISDM, JASMIN, SMP, SiAP, dan SiPTL dan juga terkait pemanfaan yang masih kurang maksimal digunakan terkait layanan yang sudah disediakan oleh Biro TI.

Pada tahun 2024, sudah dilakukan pengarahan kepada pegawai untuk terus memaksimlakan aplikasi pemeriksaan dalam kegiatan pemeriksa, dan untuk semua pegawai untuk terus melakukan *update* data diri kepegawaian melalui SiSDM Untuk meningkatkan capaian atas IKU Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Tahun 2024,

Selanjutnya Perwakilan Provinsi Bengkulu akan berkomitmen untuk terus meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi yang sudah disediakan dalam mendukung tugas dan fungsi dalam menjalankan pekerjaanya di lingkungan Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Realisasi IKU Pemanfaatan Teknologi dan Informasi memperoleh capaian 95,18% dari target tahun 2024. Dengan menerapkan berbagai langkah diatas, diharapkan target IKU ini dapat terus meningkat pada periode selanjutnya.

IKU 10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi. Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik *(Best Practice)*. *Best Practice* adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi *Best Practice*. Penerapan *Best Practice* merupakan implementasi atas *Best Practice* yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk di implementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul *Best Practice*. Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan sharing/penyebaran informasi/pengetahuan. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, reviu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI No 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK. Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan.

Tabel 3. 14 Perkembangan Capaian Realisasi IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan Tahun 2020 – 2024

IKU 10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan Tahun 2020 - 2024	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	75%	100,71%	100,71%	102,11%
Capaian	100%	75%	100,71%	100,71%	102,11%
Persentase Realisasi Tahun 2020-2023 Terhadap Target Tahun 2024	100%	75%	100,71%	100,71%	102,11%

Realisasi IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan Tahun 2024 adalah sebesar 102,11% dari target sebesar 100%, sehingga capainya sebesar 102,11%. Hal ini mengindikasikan bahwa Perwakilan Provinsi Bengkulu sudah memaksimalkan terkait penerapan Manajemen Pengetahuan di lingkungannya.

Realisasi IKU ini pada tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, ketercapaian tersebut didukung oleh Perwakilan Bengkulu telah melakukan aktivitas manajemen pengetahuan yaitu:

a. Pendidikan dan pelatihan yaitu berupa Diklat Persiapan Pemeriksaan LKPD TA 2023;
b. *Peer Assist* berupa Panduan Penyusunan SKP Prisma IKI;
c. *Coaching* Pendampingan Penyusunan Prisma IKI Versi 2.0 Tahun 2024;
d. Mentoring Pola Komunikasi dalam Rangka Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Dinas Kesehatan Kota dalam Pemenuhan Izin Klinik BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
e. *Peer Assist*: Panduan Pelaksanaan Pendaftaran PPPK di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Tahap II untuk PTT BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu; dan
f. KTF: Penjelasan dan Sosialisasi PMK No. 39 Tahun 2024 tentang SBM Tahun 2025.

Serta Perwakilan Bengkulu melakukan satu Usulan Replikasi *Best Practice* berupa Pengaplikasian Aplikasi BAYTAT (Berendo Layanan Tagihan dan Perbendahaan Terintegrasi pada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu).

Analisis mengenai peningkatan realiasi tercapainya target kinerja IKU 10 adalah sebagai berikut.

a. Langkah yang dilakukan

   Komponen penilaian IKU manajemen pengetahuan diukur dari tingkat penyusunan *Best Practice*, Tingkat penerapan *Best Practice*, dan tingkat pelaksanaan aktivitas manajemen pengetahuan. Untuk tahun 2024, dari yang dipersyaratkan empat aktivitas manajemen pengetahuan, Perwakilan Provinsi Bengkulu sudah memenuhi tingkat pelaksanaan aktivitas

manajemen pengetahuan sebanyak enam kegiatan berupa Diklat, dua *Peer Assist*, *Coaching, Mentoring* dan KTF. Perwakilan Provinsi Bengkulu juga sudah memenuhi tingkat penyusunan *Best Practice* yang dipersyaratkan yaitu satu untuk tahun 2024.

b. Alternatif yang sudah dilakukan

Dengan dibentuknya Tim Manajemen Pengetahuan, Perwakilan Provinsi Bengkulu sudah lebih tertib dalam melakukan pengelolaan manajemen pengetahuan serta mendokumentasikan dengan baik semua kegiatan yang terkait dengan aktivitas manajemen pengetahuan dengan lebih baik lagi, serta menyusun suatu rencana aksi mengenai kegiatan-kegiatan serta *Best Practice* yang akan direalisasikan dalam satu periode waktu.

Untuk mempetahankan capaian atas IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu akan berupaya untuk terus menyusun aktivitas manajemen pengetahuan berdasarkan kebutuhan pegawai dengan memaksimalkan tim pengelola manajemen pengetahuan yang dibentuk.

Realisasi IKU Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan telah mencapai 102,11% dari target Tahun 2024. Dengan menerapkan berbagai langkah diatas, diharapkan target IKU 10 dapat terus meningkat pada periode selanjutnya.

IKU 11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

IKU ini mengukur tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan. Skala hasil survei sebagaimana berikut.

- 1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan
- 2,00 - 2,99 = tidak memuaskan
- 3,00 - 3,99 = memuaskan
- 4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.

Tabel 3. 15 Perkembangan Capaian Realisasi IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi Tahun 2020 – 2024

IKU 11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
Realisasi	3,69	3,91	4,11	3,66	4,42

IKU 11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Capaian	97,10%	102,89%	108,15%	96,32%	100%
Persentase Realisasi Tahun 2020-2023 Terhadap Target Tahun 2024	97,10%	102,89%	108,15%	96,32%	100%

Realisasi IKU Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi tahun 2024 adalah sebesar 4,42 dari target 3,80 sehingga capaianya sebesar 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa BPK Perwakilan Perwakilan Provinsi Bengkulu senantiasa melakukan perbaikan dan evaluasi terkait pola komunikasi yang terjalin pada tahun 2024.

Realiasai IKU ini pada tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Ketercapaian tersebut didukung oleh para pegawai di Perwakilan Provinsi Bengkulu yang terus meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Untuk mempertahaknakn capaian atas IKU Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualita Komunikasi, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu akan melakukan langkah sebagai berikut:

- Menyediakan wadah komunikasi bagi para pemangku kepentingan khususnya para pemerintah daerah;
- Meningkatkan pola komunikasi baik dengan para *stakeholders* BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu;
- Menjadi penyedia informasi dan penyedia layanan publik bagi seluruh pemangku kepentingan dan lapisan masyarakat di lingkungan Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan mengoptimalkan penggunaan E-PPID.

Realisasi IKU Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi telah mencapai 100% dari target tahun 2024. Dengan menerapkan berbagai langkah diatas, diharapkan target IKU ini dapat terus meningkat pada periode selanjutnya.

IKU 12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Indikator ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tusi dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK. Untuk memenuhi tujuan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di berbagai lini organisasi BPK, setiap pegawai dipersyaratkan untuk diberikan pendidikan/pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh pegawai yang bersangkutan. Pemenuhan pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut: Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun (SPKN),

Standar jam pelatihan bagi non pemeriksa paling tidak 20 jam pendidikan dalam 1 tahun (UU No.5 Tahun 2014). Sehingga standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP setahun untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa.

Tabel 3. 16 Perkembangan Capaian Realisasi IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi Tahun 2020 – 2024

IKU 12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	94,87%	100%	94,59%	100%	100%
Capaian	94,87%	100%	94,59%	100%	100%
Persentase Realisasi Tahun 2020-2023 Terhadap Target Tahun 2024	94,87%	100%	94,59%	100%	100%

Realisasi IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi tahun 2024 adalah sebesar 100% dari target sebesar 100%. Sehingga capainya sebesar 100% . hal ini mengindikasikan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu komitmen mendorong para pegawai untuk terus meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi para pegawai yang bersangkutan.

Realisasi IKU ini pada tahun 2024 sama dengan capaian tahun sebelumnya. Pada Tahun 2024, Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menyelenggarakan Diklat LKPD berbasis Akrual sebagai persiapan dan sarana memperbaharui wawasan pemeriksa sebelum dilaksanakannya pemeriksaan LKPD. Sampai dengan *cut off* pelaporan IKU tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mencatat sebanyak 99 dari 99 pegawai Bengkulu telah memenuhi jam diklat.

Untuk mempertahkan capaian atas IKU Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu akan berupaya untuk terus memfasilitasi para pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan yang relevan sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban oleh pegawai yang bersangkutan. Juga BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu akan terus melakukan perencanaan dan monitoring yang baik atas kegiatan pengembangan kompetensi pegawai sesuai prioritas pembelajaran masing-masing

Realisasi IKU ini telah mencpaai 100% dari target tahun 2024. Dengan menerapkan berbagai langkah diatas, diharapkan target IKU ini dapat terus meningkat pada periode selanjutnya.

Gambar 1. Diklat LKPD Tahun Anggaran 2022

IKU 13 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran

Tingkat kinerja Implementasi Anggaran Mengukur capaian kinerja atas pengendalian dan pemantauan serta evaluasi kinerja anggaran terhadap perencanaan anggaran, melalui pengukuran Evaluasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya disingkat EKA. Anggaran adalah nilai uang yang dianggarkan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan di bidang pemeriksaan dan non pemeriksaan dalam satu tahun anggaran. Realisasi anggaran adalah nilai uang yang direalisasikan atau digunakan untuk melaksanakan suatu program dan kegiatan dimaksud dalam satu periode. Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

EKA adalah serangkaian proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis secara sistematis dan objektif atas kinerja anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas anggaran.

EKA terhadap perencaan Anggaran yang selanjutnya disingkat EKA perencanaan Anggaran adalah serangkaian proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis secara sistematis dan objektif atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

Tingkat kinerja Implementasi Anggaran pada satuan kerja diukur dengan EKA perencaaan Anggaran sesuai KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran, yang dikur dengan dua variabel, yaitu:

1) Efektivitas, diukur dengan capaian RO;
2) Efisiensi, diukur dari penggunaan SBK serta efisiensi SBK.

Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan tersebut.

Upaya Perwakilan Provinsi Bengkulu untuk meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan diukur melalui satu IKU, yaitu IKU 13 terkait Tingkat Kinerja anggaran di Lingkungan Perwakilan dengan target tahun 2024 sebesar 84,50%.

Tabel 3. 17 Perkembangan Capaian Realisasi IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran Tahun 2020 – 2024

IKU 13. Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target	87%	87,5%	88%	88,5%	84,5%
Realisasi	91,14%	90,03%	87,25%	90,24%	92,50%
Capaian	104,75%	102,89%	99,14%	101,96%	109,47%
Persentase Realisasi Tahun 2020-2023 Terhadap Target Tahun 2024	102,40%	101,15%	98,03%%	101,39%	109,47%

Realisasi IKU Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran tahun 2024 adalah sebesar 92,5% dari target sebesar 84,5%. Hal ini mengindikasikan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu berkomitmen dalam hal upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terkait perencanaan dan pelaksanan anggaran yang dilakukan selama 2024.

Realisasi IKU ini pada tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Ketercapaian tersebut didukung oleh BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu yang berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran dengan memperhatikan efektivitas, penggunaan SBK dan efisiensi SBK

Untuk mempertahkan capaian atas IKU Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

a. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kinerja pengelolaan keuangan dan anggaran, pencapaian target output, penyerapan anggaran, penyusunan rencana penarikan dana hingga pencairannya.
b. Menyusun laporan bulanan kegiatan pelaksanaan Perwakilan setiap bulannya untuk memastikan seluruh kegiatan dan output perwakilan telah tercapai sesuai rencana.
c. Memperbaiki perencanaan anggaran yang dilakukan mengingat konsistensi antara perencanaan dan implementasi merupakan salah satu indikator dalam menilai kinerja anggaran.

Realisasi IKU Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran telah mencapai 109,47% dari target tahun 2024. Dengan menerapkan berbagai langkah diatas, diharapkan target IKU ini dapat terus meningkat pada periode selanjutnya.

C. Analisis Efisiensi

Dalam rangka mewujudkan pencapaian strategi 1 yaitu meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis serta memberikan pelayanan prima kepada *stakeholder* dilakukan upaya efisiensi yang dapat mendorong terlaksananya kegiatan dan pelayanan yang lebih baik. Upaya-upaya efisiensi yang dimaksud antar lain berupa pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan BMN dan efisiensi anggaran sebagaimana diurakan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi

   Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, Perwakilan Provinsi Bengkulu sudah menerapkan penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam melakukan korespondensi di aplikasi jasmin dan penggunaan aplikasi si jamet (Sistem aplikasi peminjaman aset) dimana pegawai dapat melakukan peminjaman pada aplikasi secara langsung yang dalam hal tersebut dapat mengurangi belanja perlengkapan kertas. Selain itu juga terdapat inovasi dari keuangan yaitu berupa Baytat (Barendo Layanan Tagihan dan perbendaharaan terintegrasi) yang merupakan layanan keuangan yang diberikan oleh subbagian keuangan kepada pegawai terkait dengan keuangan dan perbendaharaan;

2. Pengelolaan BMN

   Perwakilan Provinsi Bengkulu melakukan penghapusan BMN yang tidak digunakan lagi untuk mengurasi biaya pemeliharan yang dikeluarkan, sampai dengan 31 Desember 2024, nominal BMN yang dilakukan penghapusan yaitu sebesar Rp310,287,065; dan

3. Efisiensi Pengguna Anggaran

   Perwakilan Provinsi Bengkulu melakukan efisiensi penggunaan pengendalian belanja operasional, salah satunya yaitu terkait belanja bahan yang dilakukan efisiensi sebesar Rp69.028.000,00 dan diahlihkan menjadi kegiatan belanja yang lebih produktif.

D. Perubahan Budaya Kerja

Dalam pelaksanaan tugasnya, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah berkomitmen untuk menerapkan budaya kerja CAMKOHA (Cermat, Mandiri, Kompeten, Objektif dan Handal). Cermat dalam mengerjakan setiap pekerjaan dengan penuh kehati-hatian dan ketelitian. Mandiri dalam bertindak dan tidak bergantung kepada orang lain, sebagai wujud nilai independensi. Kompeten dengan terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Objektif dalam pengambilan keputusan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi maupun pihak luar. Handal dalam melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipercaya dalam segala kondisi.

E. Realisasi Anggaran BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

Realisasi Belanja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp21.432.320.122,00 atau 99,72%% dari anggaran belanja sebesar Rp21.493.479.000,00. Rincian anggaran belanja TA 2024 dan Realisasi Belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 18 Anggaran dan Realisasi Belanja
Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2023

Kode	Uraian	Tahun Anggaran 2024			Tahun Anggaran 2023		
		Anggaran	**Realisasi**	**%**	**Anggaran**	**Realisasi**	**%**
51	Belanja Pegawai	6.668.890.000	6.662.694.472	99,91%	6.533.657.000	6.529.908.692	99,94%
52	Belanja Barang	14.197.237.000	14.142.273.650	99,61%	16.758.779.000	16.754.621.044	99,98%
53	Belanja Modal	627.352.000	627.352.000	100%	1.026.815.000	1.023.559.550	99,68%
		21.493.479.000	**24.432.320.122**	**99,72%**	**24.319.251.000**	**24.308.089.286**	**99,95%**

Adapun realisasi belanja yang digunakan dalam kegiatan pemeriksaan berupa Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP) Tahun Anggaran 2024 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3. 19 Anggaran dan Realisasi
RKP Tahun Anggaran 2023

No.	Jenis Keluaran	Kegiatan/Volume Keluaran (Output				Realisasi Anggaran		
		Target	**Realisasi**	**Satuan**	**%**	**Anggaran**	**Realisasi**	**%**
1	LHP BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	18	18	LHP	100%	7.505.162.000	7.504.856.172	100%
2	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	113	113	LHP	100%	145.403.000	145.402.000	100%
3	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	1	1	Laporan	100%	3.431.000	3.430.650	99,99%
4	Sumbangan IHPS Perwakilan	2	2	Laporan	100%	31.982.000	31.981.969	100%
5	Laporan Profil Entitas Perwakilan	11	11	Laporan	100%	7.909.000	7.908.600	99,99%
6	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	22	22	Laporan	100%	155.726.000	155.725.300	100%

No.	Jenis Keluaran	Kegiatan/Volume Keluaran (Output				Realisasi Anggaran		
		Target	Realisasi	Satuan	%	Anggaran	Realisasi	%
	BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu							
7	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu	22	22	Laporan	100%	89.087.000	89.086.600	100%
8	Layanan Manajemen Pemeriksaan Pada Perwakilan	12	12	Laporan	100%	566.767.000	566.763.398	100%
Jumlah		**201**	**201**	**Laporan**	**100%**	**8.505.467.000**	**8.505.154.689**	**100%**

Secara lebih rinci, uraian atas realisasi anggaran RKP Perwakilan Provinsi Bengkulu tahun 2024 akan diuraikan pada bagian berikut:

1. LHP BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

   Pada Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu sudah menerbitkan LHP LKPD TA 2023 sebanyak 11 Laporan dan LHP Kinerja dan Kepatuhan sebanyak tujuh laporan, sehingga perwakilan Bengkulu sudah menerbitkan 18 Laporan atau 100% dari target 21 Laporan di tahun 2024 dengan alokasi Rp7.505.162.000,00 dan telah terealisasi Rp7.505.856.172,00.

2. LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu

   Pada tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menghasilkan 113 output berupa LHP dari total target sebanyak 113 LHP atas Dana Banpanrpol pada Partai Politik di lingkungan Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan alokasi anggaran sebesar Rp145.403.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp145.402.000,00 atau sebesar 100%.

3. Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan

   Pada tahun 2024, Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menghasilkan satu laporan rumusan bahan pendapat dari target satu laporan dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.431.000,00 dan telah terealisasi Rp3.343.650,00 atau sebesar 99,99%.

4. Sumbangan IHPS Perwakilan

   Pada tahun 2024, Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menghasilkan 2 keluaran/*output* sumbangan IHPS dari target 2 ouput dengan total anggaran sebesar Rp31.982.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp31.981.969,00 atau sebesar 100%.

5. Laporan Profil Entitas Perwakilan

Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menghasilan 11 laporan dari target 11 laporan profil entitas dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.909.000,00 dan telah teralisasi Rp7.908.600,00 atau sebesar 99,99%.

6. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Perwakilan Provinsi Bengkulu

   Pada tahun 2024, Perwakilan Provinsi Bengkulu sudah menerbitkan 22 Laporan Pemantauan TLRHP BPK dari target sebanyak 22 Laporan dengan total anggaran sebesar Rp155.726.000,00 dan telah terealisasi Rp155.725.300,00 atau sebesar 100%.

7. Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah Perwakilan Provinsi Bengkulu

   Pada tahun 2024, Perwakilan Provinsi Bengkulu sudah menerbitkan 22 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah dari total 22 Laporan dengan total anggaran sebesar Rp89.087.000,00 dan telah terealisasi Rp89.086.600,00 atau sebesar 100%.

8. Layanan Manajemen Pemeriksaan Pada Perwakilan

   BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menghasilkan 12 output layanan administrasi pemeriksaan dari target 12 Output/Keluaran sampai dengan 31 Desember 2024 dengan anggaran sebesar Rp566.767.000,00 dan realisasi sebesar Rp566.763.398,00 atau senilai 100%.

Sedangkan, berdasarkan Rencana Kerja Sekretariat Penunjang (RKSP), pada tahun 2024, Perwakilan Provinsi Bengkulu mengalokasikan anggaran sebesar Rp12.989.012.000 dan sampai dengan 31 Desember 2024, anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp12.941.640.288,00 atau sebesar 99,89%. Adapun berbagai output/keluaran yang telah dihasilkan sampai dengan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 20 Realisasi Volume Keluaran dengan Realisasi Anggaran Tahun 2024

No.	Jenis Keluaran	Volume Keluaran (Output)				Realisasi Anggaran Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Satuan	%	Anggaran	Realisasi	%
1.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	1	Layanan	100%	11.079.822.000	11.073.208.437	99,94%
2.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	47	47	Unit	100%	517.782.000	517.782.000	100%
3.	Layanan Manajemen Internal	21	21	Laporan	100%	1.280.838.000	1.241.079.851	96,90%
4.	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	13	13	Unit	100%	109.570.000	109.570.000	100%
Jumlah		**82**	**82**		**100%**	**12.988.012.000**	**12.941.640.288**	**96,39%**

Adapun uraian atas realisasi anggaran Rencana Kerja Sekretariat Penunjang (RKSP) tahun 2024 pada Perwakilan Provinsi Bengkulu, secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Layanan Perkantoran

   BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah merealisasikan satu layanan perkantoran dengan total anggaran sebesar Rp11.079.822.000,00 dan telah terealisasi 99,94% atau sebesar Rp11.073.208.437,00. Realisasi tersebut secara optimal telah digunakan untuk membiayai kegiatan pada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu sebagai berikut:

   1.1. Pembayaran Gaji Tunjangan dengan anggaran sebesar Rp6.668.890.000,00 dan realisasi sebesar Rp6.667.019.327,00 atau sebesar 99,97%;

   1.2. Layanan Perkantoran Bidang TU Kalan dengan anggaran sebesar Rp259.908.000,00 dan realiasasi sebesar Rp259.906.754,00 atau sebesar 100%;

   1.3. Layanan Perkantoran Bidang Kehumasan dengan anggaran sebesar Rp29.984.000,00 dan realisasi sebesar Rp29.984.000,00 atau sebesar 100%;

   1.4. Layanan Perkantoran bidang Sumber Daya Manusia dengan anggaran sebesar Rp325.895.000,00 dan realisasi sebesar Rp325.894.510,00 atau sebesar 100%;

   1.5. Layanan Perkantoran Bidang Keuangan dengan anggaran sebesar Rp97.688.000,00 dan realisasi sebesar Rp97.688.000,00 atau sebesar 100%;

   1.6. Layanan Perkantoran Umum dan TI dengan anggaran sebesar Rp3.180.547.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp3.180.537.701,00 atau sebesar 100%.

   1.7. Layanan Dukungan Kesekretariatan Perwakilan dengan anggaran sebesar Rp516.910.000,00 dan realisasi sebesar Rp512.178.145,00 atau sebesar 99,08%.

2. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

   BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah merealisasikan 47 output dari 47 target ouput/keluaran, dengan total anggaran sebesar Rp517.782.000,00 dan telah terealisasi 100% atau sebesar Rp517.782.00,00.

3. Layanan Manajemen Internal Perwakilan

   BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah merealisasikan 21 Laporan Manajemen Internal Perwakilan dari target 21 ouput/keluaran dengan total anggaran sebesar Rp1.280.838.000,00 dan telah terealisasi 96,90% atau sebesar Rp1.241.079.851,00 yang digunakan untuk membiayai kegiatan pada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, dengan rincian sebagai berikut:

   3.1. Layanan Tata Usaha Perwakilan dengan alokasi anggaran sebesar Rp138.208.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp138.206.054,00 atau sebesar 100%;

   3.2. Layanan Kehumasan Perwakilan dengan alokasi anggaran sebesar Rp118.950.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp118.949.020,00 atau sebesar 100%;

   3.3. Layanan Sumber Daya Manusia Perwakilan dengan alokasi anggaran Rp223.562.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp223.558.786,00 atau sebesar 100%;

   3.4. Layanan Keuangan Perwakilan dengan alokasi anggaran sebesar Rp322.574.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp291.752.686,00 atau sebesar 90,45%;

3.5. Layanan Umum dan TI Perwakilan dengan alokasi anggaran sebesar Rp228.410.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp228.406.201,00 atau sebesar 99,99%;

3.6. Layanan Hukum Perwakilan dengan alokasi anggaran sebesar Rp165.637.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp165.635.220,00 atau sebesar 100%;

3.7. Layanan Dukungan Pembinaan Pimpinan BPK dengan alokasi anggaran sebesar Rp54.931.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp54.930.064 atau sebesar 100%;

3.8. Layanan Pengelolaan Kinerja dan Manajemen Risiko dengan alokasi anggaran sebesar Rp28.566.000 dan telah terealisasi sebesar Rp19.641.820,00 atau sebesar 68,76%;

4. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

BPK Bengkulu telah merealisasikan 13 Unit dari target 13 unit *Output*/Keluaran dengan total anggaran sebesar Rp109.570.000,00 dan telah terealisasi Rp109.570.000,00 atau 100% yang digunakan untuk membiayai Pengadaan perangkat Pengolah Data dan Informasi pada BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu merupakan sumbangan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 pada AKN V sebagai perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja, baik keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai misi dan visi dalam rangka terselenggaranya *good governance* yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme.

Secara umum, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah mencapai skor kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar **100,01** dari skor maksimal 105. Ketidaktercapaian ini merupakan implikasi dari beberapa indikator kinerja yang belum mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu:

a. IKU 1 Tingkat Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
b. IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
c. IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi.

Permasalahan dan kendala yang menjadi penyebab tidak tercapainya beberapa target IKU BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, antara lain:

1. Masih terdapat beberapa unsur temuan berupa nilai/angka yang belum konsisten antara judul, kondisi, akibat, rekomendasi, dan lampiran;
2. Secara keseluruhan, Pemerintah Daerah telah berupaya menindaklanjuti rekomendasi atas hasil pemeriksaan BPK. Disamping itu, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah berupaya melakukan langkah percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Namun, rekomendasi yang ditindaklanjuti sebagian besar masih belum sesuai atau dalam proses tindak lanjut sehingga tidak dapat diperhitungkan ke dalam capaian IKU 3. Selain itu, terdapat kecenderungan kurangnya kesadaran entitas dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK, khususnya kurang proaktifnya entitas dalam mengupayakan percepatan penyelesaian tindak lanjut;
3. Masih rendahnya tingkat pemanfaatan Teknologi Informasi di lingkungan para pegawai BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, sehingga IKU 9 masih belum mencapai target.

Upaya-upaya yang akan dilakukan Perwakilan Provinsi Bengkulu dalam rangka pemenuhan target tahun berikutnya diantaranya:

1. Perwakilan Provinsi Bengkulu akan berupaya membentuk Tim *Checker* (memberdayakan pemeriksa khusus) yang mempunyai ketelitian dan keahlian dalam melakukan pengecekan terutama akurasi dan konsistensi untuk meningkatkan perhatian pada kesalahan konsistensi dan akurasi yang terjadi pada tahun sebelumnya guna meningkatkan kinerja reviu konsep LHP secara berjenjang sebelum diterbitkannya LHP;

2. Dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi dalam hasil pemeriksaannya, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu secara berkala telah melakukan pembahasan TLRHP dengan seluruh pihak Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Bengkulu. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses penyelesaian tindak lanjut, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu selain mengimplementasikan penggunaan aplikasi SiPTL, juga membuka ruang konsultasi melalui *helpdesk* TLRHP dan mendorong kepada entitas untuk menginventarisir tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun-tahun yang telah lama agar segera dapat diselesaikan, baik yang mudah ditindaklanjuti menjadi status 1 (selesai ditindaklanjuti) maupun yang sulit ditindaklanjuti menjadi status 4 (tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah) dengan didukung dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu berupaya mendorong tingkat penggunaan Teknologi dan Informasi bagi seluruh pegawai, tidak hanya terkait pemeriksaan, namun juga terkait aplikasi non pemeriksaan.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 Perwakilan Provinsi Bengkulu ini diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan maupun untuk penetapan kebijakan oleh pimpinan BPK.

Lampiran 1

Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran		Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi • **Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas** • **Meningkatnya Layanan Pemeriksaan**	1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%
	2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%
	3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	75%
	4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%
	5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%
	6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%
	7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Sangat Memuaskan (5,00)
	8	Hasil Evaluasi AKIP	A (89,00)
	9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi Informasi	98%
	10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%
	11	Tingat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Memuaskan (3,80)
	12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%
	13	Tingkat Kinerja Anggaran	84,50%